



PUTUSAN

Nomor 3391/Pdt.G/2022/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK: 3215254407770004, Jambi, 04 Juli 1977, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di rumah saudara a.n Ibu Musda Lindawati, Dusun Cariu Timur, RT. 003 RW. 003, Desa Pangulah Utara, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, Tempat tanggal lahir: Palembang, 03 Maret 1975, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di rumah saudaraya a.n Bapak Asep, Jl. Sukamanah, Dusun Karang Salam, RT. 001 RW. 005, Desa Pucung, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 September 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, dengan Nomor 3391/Pdt.G/2022/PA.Krw, tanggal 20 September 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 11 Februari 1999, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat I, Kabupaten Kota Palembang, dengan bukti

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 3391 /Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 968/81/II/1999, tertanggal 12 Februari 1999;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah tersebut di atas;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama yang alamatnya sesuai dengan alamat Penggugat di atas. Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah di karuniai 4 orang anak yang bernama, 1. Djuwita Permata Sari, lahir tanggal 28 Januari 2000, umur 22 tahun, 2. Mutiara Mariyani Sari, lahir tanggal 28 Maret 2002, umur 20 tahun, 3. Intan Mayang Sari, lahir tanggal 28 Oktober 2005, umur 17 tahun, 4. Muhammad Raka Bagaskara, lahir tanggal 18 April 2007, umur 15 tahun dan sekarang anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa sekitar bulan Mei 2021, kondisi rumah tangga mulai tidak harmonis antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap Penggugat yakni Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari hari mengandalkan penghasilan jualan Penggugat;

5. Bahwa selain permasalahan tersebut di atas, Tergugat juga bersikap tempramental yakni mudah emosi, serta sering mengeluarkan kata kata kasar, bahkan Tergugat juga berani melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;

6. Bahwa setelah permasalahan tersebut diatas, Penggugat tetap bersabar dan mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat sudah berupaya meminta bantuan pihak keluarga untuk menasihati dan mendamaikan, namun tidak berhasil;

7. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan Januari 2022, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Penggugat pergi ke rumah saudara yang alamat nya sesuai dengan alamat Penggugat di atas,

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 3391 /Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah saudaranya yang sesuai dengan alamat Tergugat di atas. Sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai, dan oleh karena itu untuk menghindari permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini berdasarkan peraturan yang berlaku; Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini berdasarkan peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas kiranya cukup beralasan bagi Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini ke Pengadilan Agama Karawang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan Talak satu Bain Sughro Tergugat (M. Khairudin Ismanto bin Darjo) terhadap Penggugat (Leni Marlina binti Musnir D)
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang Seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 3391 /Pdt.G/2022/PA.Krw



Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

- Fotocopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 968/81/II/1999, tertanggal 12 Februari 1999, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat I, Kabupaten Kota Palembang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P);

B. Saksi:

1. **Joko Suprianto bin Musnir D**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Sukamulya RT. 003 RW. 002 Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang. Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dalam hubungan selaku adik kandung Penggugat
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, mereka menikah pada tanggal tanggal 11 Februari 1999, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat I, Kabupaten Kota Palembang;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah milik bersama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 4 orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak Mei 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;



- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar, hanya dari curhat Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu mereka bertengkar karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap Penggugat yakni Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga, dan Tergugat juga bersikap tempramental yakni mudah emosi, serta sering mengeluarkan kata kata kasar, bahkan Tergugat juga berani melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2022, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat karena Tergugat sudah tidak bertanggungjawab;
- Bahwa sudah musyawarah kedua keluarga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. **Ahmad Alwani bin Oji Marsidin**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun Cikampek Pusaka, RT. 003 RW. 001 Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dalam hubungan selaku tetangga Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, mereka menikah pada tanggal tanggal 11 Februari 1999, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat I, Kabupaten Kota Palembang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah milik bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 4 orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak Mei 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
 - Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa yang saksi tahu mereka bertengkar karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap Penggugat yakni Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga, dan Tergugat juga bersikap tempramental yakni mudah emosi, serta sering mengeluarkan kata kata kasar, bahkan Tergugat juga berani melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2022, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat hingga sekarang;
 - Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat karena Tergugat sudah tidak bertanggungjawab;
 - Bahwa sudah musyawarah kedua keluarga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 3391 /Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya perkara ini akan diputus tanpa kehadiran Tergugat. Dengan tidak hadirnya tersebut, maka Tergugat dianggap tidak membantah dan telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pada setiap kali sidang Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang diajukan oleh Penggugat sebagai dasar alasan cerai gugat ini adalah sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang mengisyaratkan harus ada perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara suami isteri itu dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang adanya alasan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menurut hukum Islam, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Karawang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi keluarga dan atau orang dekat dengan kedua belah pihak, guna memenuhi

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 3391 /Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangannya saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, kesaksian mana telah memenuhi ketentuan pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR. setelah dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak serta bukti lain, maka dapatlah disimpulkan hal-hal/fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hubungannya sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Februari 1999, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat I, Kabupaten Kota Palembang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah milik bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 4 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak Mei 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa yang saksi tahu mereka bertengkar karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap Penggugat yakni Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga, dan Tergugat juga bersikap tempramental yakni mudah emosi, serta sering mengeluarkan kata kata kasar, bahkan Tergugat juga berani melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2022, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat karena Tergugat sudah tidak bertanggungjawab;

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 3391 /Pdt.G/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah musyawarah keluarga, tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah disimpulkan tersebut diatas, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Hal mana antara mereka tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berarti alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam sidang telah menunjukkan sikap kebenciannya dan keengganannya untuk rukun kembali dengan Tergugat yang pada kesimpulannya Penggugat bertetap pada gugatannya, maka dalam perkara ini dapat diterapkan dalil dari kitab Ghoyatul Marom berbunyi:

اذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Di waktu si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak si suami";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan telah terbukti pula bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata telah tidak dapat ditegakkan lagi, karena rumah tangga tersebut telah tidak ditopang diatas suasana ketentraman, kecintaan, kasih-sayang, harmonisnya pergaulan serta masing-masing pihak telah tidak menunaikan apa yang menjadi kewajibannya, sehingga dengan demikian menurut pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 3391 /Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan Pasal 125 HIR serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp.480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rabi'ul Awwal 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. R. A. Satibi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Jajang Suherman SH., dan Drs. H. Syarifudin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Andi putra, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. R. A. Satibi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Syarifudin, M.H.

Drs. Jajang Suherman SH

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 3391 /Pdt.G/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi putra, S.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan Penggugat	Rp 100.000,-
4. Panggilan Tergugat	Rp 240.000,-
5. Biaya PNBP Penyerahan	Rp. 10.000,-
Panggilan Pertama Penggugat	
6. Biaya PNBP Penyerahan	Rp. 10.000,-
Panggilan Pertama Tergugat	
7. Redaksi	Rp 10.000,-
8. Meterai	Rp 10.000,-

Jumlah

Rp 480.000,-
(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 3391 /Pdt.G/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)